

**A B S T R A K**

Tesis ini mengkaji eksistensi perjanjian penanggungan dengan adanya putusan pernyataan pailit serta hak kreditor untuk meminta pertanggungjawaban penanggung atas utang debitor yang pailit. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi perjanjian penanggungan dengan adanya putusan pernyataan pailit adalah putusan pernyataan pailit tidak berakibat berakhirnya perikatan antara debitor pailit dengan kreditor dalam hal ini hubungan utang piutang. Perjanjian utang piutang berakhir manakala kewajiban debitor untuk melunasi utangnya kepada kreditor telah dipenuhi, atau dengan kata lain telah terdapat pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 BW. Dengan belum berakhirnya perjanjian pokok yaitu utang piutang, maka perjanjian penanggungan sebagai perjanjian jaminan juga masih eksis sesuai dengan prinsip *accessoir* yang melekat pada perjanjian pokoknya. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hak kreditor untuk meminta pertanggungjawaban penanggung atas utang debitor pailit terdapat 2 (dua) cara yaitu hak kreditor untuk mengajukan tagihan kepada kurator dan melakukan pencocokan utang, sehingga akan mendapatkan pelunasan atas piutangnya dari hasil pemberesan harta pailit. Manakala kreditor tidak mendapatkan pembayaran atau pelunasan dari harta pailit, setelah proses kepailitan berakhir kreditor dapat meminta pertanggungjawaban penanggung untuk membayar utang atau meminta sisa utang debitor pailit, meskipun penanggung telah melepaskan hak istimewanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 poin 4 BW. Karena didalam UU K-PKPU tidak diatur mengenai hak kreditor pemegang jaminan penanggungan untuk menuntut pertanggungjawaban penanggung atas utang debitor pailit, seperti kreditor pemegang jaminan kebendaan.

**Kata Kunci : Kepailitan, Jaminan Penanggungan, Penanggung.**

**ABSTRACT**

*This thesis analyze the existence of borghtocht in case of there is a court decision of insolvency statement and the creditor's right to ask for performance from insolvent debtor. This thesis use juridical-normative method. The result of the research is that the court decision of insolvency statement do not affect the agreement between the creditor and debtor, in this case is relationship of accounts payable. The debt agreement is over when the debtor fulfils his performance to the creditor, in other words there must be a payment from the debtor in order to terminate the agreement, as regulated in article 1381 BW. The implication of the existence of the debt agreement is that the accessoir agreement which is attached to the primary agreement is still exist. In this case, the accessoir agreement of debt agreement is borgtocht. There are two ways that can be used by the creditor to ask the borg to fulfil the performance, in case of the debtor is insolvent. First, the creditor can use his right to file the bill to curator and match the debt, so that the creditor will get payment from the proceeds of insolvency. In case the creditor does not get the payment from the proceeds of insolvency, the creditor can ask the borg to fulfil the performance after the end of the insolvency process, eventhough the borg has released his privileges. It is as regulated in article 1832 point 4 BW. It is because the Law of K-PKPU does not regulate about the rights of creditor with guarantee to ask for the borg to fulfil the performance before the proceeds of insolvency finish, such as creditor with collateral.*

*Keyword: Insolvency, Guarantee, Guarantor.*